

ANALISIS REALISASI ANGGARAN RUTIN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MINAHASA

David Tuberta Saronitema Zebua¹, Johny Manaroinsong², Florence Moroki³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Manado, Tondano

e-mail: davidtuberta123@gmail.com, jhonymanaroinsong@unima.ac.id, Florencemoroki@unima.ac.id

Diterima: 7-7-2021 Disetujui: 29-7-2021

Abstrak

Tujuan riset ini adalah untuk menganalisis realisasi anggaran rutin badan pengelola keuangan dan aset daerah Kabupaten Minahasa dengan maksud menentukan dasar bagi pemerintah dalam menyajikan laporan pencapaian anggaran dalam rangka pencapaian tujuan akuntabilitas publik. Riset ini merupakan jenis riset kuantitatif metode deskriptif. Populasi riset ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Minahasa dan sampelnya diambil dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Minahasa tahun 2016–2019. Desain penelitian berfokus menganalisis data Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa berdasarkan rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Teknik analisis datanya dilakukan dengan menganalisis, menafsirkan dan mengolah data. Dari hasil analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa kurang berjalan dengan baik karena rasio efektivitas pendapatan daerah mengalami penurunan dan rasio efisiensi kinerja keuangan cenderung menunjukkan kategori kurang baik. serta setiap tahun terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa namun aparaturnya kurang mampu menata hasil pendapatan asli daerah sehingga harus bergantung dengan Dana Pemerintah.

Kata kunci: Anggaran keuangan; Badan pengelola keuangan; Efektivitas; Efisiensi

Abstract

The purpose of this research is to analyze the realization of the routine budget of the Minahasa Regency financial and asset management agency with the aim of determining the basis for the government in presenting reports on budget achievements in order to achieve the objectives of public accountability. This research is a type of quantitative research with descriptive method. The population of this research is the Minahasa Regency Government Budget Realization Report and the sample is taken from the Minahasa Regency Government Budget Realization Report 2016–2019. The research design focuses on analyzing the Minahasa Regency Financial and Asset Management data based on the effectiveness ratio and efficiency ratio. The data analysis technique is done by analyzing, interpreting and processing the data. From the results of the analysis of the financial performance of the Minahasa Regency Government, it is not going well because the effectiveness ratio of regional income has decreased and the efficiency ratio of financial performance tends to show a poor category. and every year there is an increase in the Regional Original Revenue of the Minahasa Regency Government, but the regional apparatus is less able to manage the results of the regional original income so they must rely on Government Funds.

Keywords: Financial budget; Financial management agency; Effectiveness; Efficiency

Pendahuluan

Dalam kondisi modern, laporan keuangan merupakan basis informasi yang paling lengkap, objektif, dan dapat diandalkan yang menjadi dasar manusia dalam membentuk opini dan posisi keuangan saat ini (Hasanah & Vidiyastutik, 2018; Osadchy et al., 2018). Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, laporan keuangan termasuk sumber informasi yang transparan yang komposisi, isi dan bentuk penyajiannya disatukan oleh parameter dasar, hal ini bisa berkemungkinan mengembangkan metode standart untuk membaca dan menganalisisnya (Suryanto & Thalassinis, 2017). Laporan realisasi anggaran merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Struktur laporan realisasi anggaran sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Standarisasi laporan ini telah ditetapkan untuk mengatur bagaimana laporan realisasi anggaran harus disajikan (Leukamang et al., 2016; Sajow et al., 2017).

Tujuan penetapan standart laporan pencapaian anggaran adalah untuk menentukan dasar bagi pemerintah dalam menyajikan laporan pencapaian anggaran dalam rangka pencapaian tujuan akuntabilitas publik. Dengan menyusun laporan realisasi anggaran, informasi terkait realisasi dan anggaran entitas pelapor dapat dihasilkan. Berdasarkan informasi tersebut maka dapat dilakukan perbandingan antara anggaran dan realisasi anggaran yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan yang disepakati antara eksekutif dan legislative serta bagaimana proses penyerapan anggaran berlangsung. Hasil laporan realisasi anggaran memberikan informasi yang bermanfaat dalam memperediksi sumber daya ekonomi dalam mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dimasa yang akan datang dengan memperkenalkan laporan secara komparatif (Nisa & Hanifah, 2020).

Informasi laporan realisasi anggaran (LRA) sangat bermanfaat untuk mereview keputusan alokasi sumber daya ekonomi, pertanggungjawaban serta pelaporan pemenuhan kebutuhan anggaran. Hasil akhir kemudian akan ditransfer ke neraca keuangan. Laporan realisasi anggaran secara umum harus sesuai dengan standarisasi akuntansi pemerintah (SAP) (Silvia et al., 2013). Laporan realisasi anggaran dan standart akuntansi pemerintah telah diatur dalam PSAP no 2 yang menjelaskan seputar realisasi anggaran serta prinsip-prinsip laporan realisasi anggaran beserta regulasinya. Tercetusnya UU No. 32 Tahun 2004 terkait Pemerintah Daerah dan Resolusi No. 33 melaporkan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan titik awal otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengurus kemaslahatan masyarakat setempat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat regional, proporsional, demokratis, adil dan transparan (Badrudin & Siregar, 2015).

Mempertimbangkan kondisi, potensi, kebutuhan daerah serta pertanggungjawaban pengelolaan dan pengawasan keuangan, melalui undang-undang ini kita mampu memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan urusan pemerintahan seperti perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi. Sehingga, pemerintah daerah terdorong agar lebih memberdayakan untuk mengembangkan seluruh potensi daerahnya. Pertimbangan diadakan otoda ini dengan tujuan masyarakatan menginginkan keterbukaan dan kemandirian terkait masalah pembangunan dalam negeri.

Perangkat kebijakan utama pemerintah daerah yang mendukung posisi pusat dalam mengembangkan kapasitas dan efektifitas pemerintah daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Wulandari et al., 2020). APBD ini bertugas untuk menentukan jumlah pendapatan dan perbelanjaan, membantu mengambil keputusan terkait masalah pembangunan daerah, otorisasi belanja di masa mendatang, standarisasi perumusan evaluasi kerja, pemotivator pegawai, serta koordinator dalam semua kegiatan. Secara khusus, tujuan laporan keuangan pemerintah daerah yakni mampu memberikan informasi dalam pengambilan keputusan serta membuktikan tanggung jawab pemerintah daerah atas sumber yang dipercayainya. Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pemerintah, bidang pembangunan, bidang pengabdian masyarakat, serta pemerintah daerah wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah selama pelaksanaan tugasnya untuk dinilai apakah proyek yang diagendakan telah berhasil. Dalam menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam

mengelola keuangan daerah yakni menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang dilaksanakan (Rampengan et al., 2021; Yandra et al., 2018).

Dalam berita Manado Pos menginformasikan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Minahasa menurut Kaban BPKAD Kabupaten Minahasa Donald Wagey pada masa di tengah pandemi Covid-19 tetap mengoptimalkan kinerja sembari memperhatikan standart operasional sesuai anjuran pemerintah, dengan harapan jalannya pemerintah Kabupaten Minahasa di bidang keuangan tidak terbengkalai. Faktanya saat ini kami sedang menyusun pemberian bantuan sosial tunai (BST) bagi masyarakat kurang mampu di Minahasa (Daling, 2013).

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Tahunan.

Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan
2016	1.307.154.121.966	1.314.065.101.716
2017	1.195.337.150.000	1.276.079.815.204
2018	1.240.173.197.898	1.267.974.996.960
2019	1.332.541.938.509	1.300.024.724.183

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran BPKAD Minahasa (Data diolah).

Dari Sumber data diatas Laporan Realisasi Anggaran BPKAD Minahasa dari tahun 2016-2019 menunjukkan perkembangan anggaran pendapatan terhadap realisasi pendapatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa secara rutin mengalami fluktuasi penurunan dan peningkatan. Hal tersebut memunculkan ketertarikan peneliti untuk menganalisis realisasi anggaran rutin yang terjadi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah khususnya di daerah Kabupaten Minahasa dengan maksud untuk mentransparansi informasi terkait laporan realisasi anggaran yang sudah dilaksanakan oleh daerah Kabupaten Minahasa, sesuai dengan landasan teori yang mengungkapkan bahwa melalui Laporan Realisasi Anggaran dapat diketahui prediksi tentang sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta resiko ketidakpastian atas sumber daya ekonomi tersebut. Selain itu, Laporan Realisasi Anggaran juga memberikan informasi tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi yang diperoleh dan digunakan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas yang sesuai dengan anggaran yang ditetapkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Nurfadillah, 2018).

Dalam menganalisis pengukuran antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan serta hubungan antara hasil yang direncanakan dengan hasil yang sesungguhnya sangat penting dilakukan pengukuran efektivitas dan efisiensi dengan metode pengukuran rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Pekerjaan bisa dikatakan berjalan secara efektif jika selaras dengan tujuan yang sudah ditetapkan telah mencapai keberhasilan. Sementara, untuk mengefisien pekerjaan perlu dilakukan trik dengan cara mengevaluasi pekerjaan, kemudian membuat perbandingan antara pengeluaran dan pemasukan. Intinya, efisiensi merupakan pencarian cara terbaik agar tujuan bisa tercapai sesuai target (Kamal, 2017; Nisa & Hanifah, 2020).

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisa keefektifan dan efisiensi realisasi anggaran rutin pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa.

Metode

Riset ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Riset kuantitatif merupakan jenis riset yang spesifikasinya sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga akhir (Lock & Seele, 2015). Sementara, metode deskriptif merupakan suatu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang didapat (Kemp et al., 2018). Desain riset yang digunakan adalah jenis riset analisis yang berfokus menganalisis data hasil riset yang didapat melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa melalui rasio efektivitas dan rasio efisiensi.

Kriteria pengambilan sampel dalam riset ini yakni mengambil Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Minahasa selama 4 tahun sejak tahun 2016 hingga 2019 karena ditahun tersebut data laporan realisasi anggaran sangat fluktuatif tidak seimbang antara *outcome* dan *output* sehingga menarik ketertarikan peneliti untuk dilakukan teknik analisis. Dalam mengumpulkan data riset, dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi dengan cara mencatat atau menyalin dokumen maupun data lain yang terkait dengan sumber yang diteliti, serta teknik kepustakaan seperti materi perkuliahan, jurnal penelitian dan skripsi terdahulu sebagai sumber referensi untuk mencocokkan teori dengan masalah yang dianalisis.

Teknik analisis data dalam riset ini dilakukan dengan menganalisis, menafsirkan dan mengolah data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa yang dikaitkan dalam rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Untuk menentukan rasio efektivitas dilakukan dengan membandingkan nilai realisasi pendapatan dengan nilai anggaran pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa yang diringkas dalam persamaan matematis sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\% \quad (1)$$

Tabel 2. kriteria efektivitas kinerja keuangan.

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
Diatas 100	Sangat Efektif
100	Efektif
90 – 99	Cukup Efektif
75 – 89	Kurang Efektif
Dibawah 75	Tidak Efektif

Sementara, rasio efisiensi diukur menggunakan perbandingan antara output yang digunakan (realisasi belanja) terhadap input yang dihasilkan (realisasi pendapatan) yang ditunjukkan dalam persamaan matematis sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\% \quad (2)$$

Tabel 3. kriteria efisiensi kinerja keuangan.

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
Diatas 100	Tidak Efisien
90 – 100	Kurang Efisien
80 – 90	Cukup Efisien
60 – 80	Efisien
Dibawah 60	Sangat Efisien

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Riset ini melakukan analisis terhadap Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa dengan tujuan mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa menggunakan dua sub rasio yakni rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Performa finansial Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa dikatakan sangat efektif apabila rasio efektivitas menunjukkan nilai $\geq 100\%$, serta Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa dikatakan efisien apabila rasio efisiensi menunjukkan nilai $< 100\%$.

Berikut merupakan data-data penelitian yang diperlukan dalam analisis Laporan Realisasi Anggaran tahun 2016 hingga 2019. Laporan Realisasi Anggaran dana daerah kabupaten

minahasa Tahun 2016 ditampilkan dalam Tabel 4. Dari hasil laporan diperoleh informasi bahwa anggaran daerah kabupaten minahasa di tahun 2016 memperoleh pendapatan sebanyak 1.307.154.121.966,-, namun ditahun ini realisasi anggaran tercapai 1.314.065.101.716. Ini menandakan bahwa anggaran yang terealisasi melebihi batas pendapatan yang diterima oleh daerah. Karena disebabkan oleh efek belanja operasi seperti hibah dan belanja bantuan sosial yang tidak dianggarkan namun terjadi realisasi yang menyebabkan pendapatan dana mengalami pembengkakan.

Tabel 4. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016.

AKUN	ANGGARAN	REALISASI
Pendapatan	1.307.154.121.966	1.314.065.101.716
PAD	73.954.865.578	77.933.004.819
Pajak daerah	23.918.100.000	28.662.130.479
Daper	883.630.830.306	977.670.435.526
Hibah	-	49.317.288.666
Belanja	1.333.332.719.912	1.322.939.724.000
Belanja pegawai	614.715.782.534	583.112.000.000
Belanja hibah	5.650.000.000	19.329.287.000
Belanja bantuan social	-	417.500.000
Belanja pegawai	8.742.074.980	-

Rangkuman laporan realisasi anggaran dana daerah kabupaten minahasa Tahun 2017 diilustrasikan dalam Tabel 5. Berdasarkan tabel dibawah telah diketahui bahwa anggaran daerah kabupaten minahasa ditahun 2017 terluncur sebesar 1.195.337.150.000, sementara realisasi anggarannya sebesar 1.276.079.815.204. Data ini mengalami ketidak sinkronan antara anggaran dana daerah dengan realisasi kebutuhan daerah. Hal ini disebabkan karena dana darurat dan kebutuhan tak terduga yang semula tidak dianggarkan telah timbul pengeluaran kucuran dana untuk hal tersebut. Sehingga realisasi melebihi anggaran pendapatan daerah.

Tabel 5. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017.

AKUN	ANGGARAN	REALISASI
Pendapatan	1.195.337.150.000	1.276.079.815.204
PAD	74.837.474.000	112.621.999.187
Pajak daerah	24.574.900.000	37.664.806.022
Daper	872.895.286.000	890.058.712.453
Hibah	863.200.000	1.987.000.000
Belanja	1.210.263.593.700	1.272.422.425.685
Belanja hibah	25.161.200.000	44.602.271.245
Belanja bantuan social	1.000.000.000	580.000.000
Belanja pegawai	8.693.455.000	0

Laporan realisasi anggaran dana daerah kabupaten minahasa tahun 2018 ditunjukkan dalam Tabel 6. Teramati dalam Tabel 6 bahwa pendapatan anggaran dana daerah diperoleh 1.240.173.197.898, sementara realisasi penggunaan dana daerah sekitar 1.267.974.996.960. Data ini mengalami pembengkakan realisasi penggunaan dana daerah dibandingkan dengan anggaran pendapatan daerah. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ditahun ini terdapat anggaran dana yang tidak terealisasi seperti belanja pegawai. Serta terdapat kebutuhan daerah yang tidak dianggarkan dan juga tidak terealisasi seperti dana darurat dan belanja bunga.

Tabel 6. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018.

AKUN	ANGGARAN	REALISASI
Pendapatan	1.240.173.197.898	1.267.974.996.960

PAD	89.161.647.000	94.590.405.094
Pajak daerah	33.479.000.000	40.954.428.429
Daper	916.096.197.000	911.587.605.152
Hibah	23.984.800.000	22.109.400.000
Dana darurat	-	-
Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya	33.773.936.898	59.111.854.206
Belanja	1.253.860.648.221	1.273.130.917.962
Belanja bunga	-	-
Belanja hibah	74.861.428.045	92.668.477.334
Belanja bantuan sosial	6.429.505.500	6.290.493.100
Belanja pegawai	8.968.870.000	-

Laporan realisasi anggaran dana daerah kabupaten minahasa tahun 2019 ditunjukkan dalam Tabel 7. Berdasarkan tabel teramati bahwa di tahun 2019 ini tidak ada bantuan keuangan dari propinsi atau pemda serta banyak sekali kebutuhan daerah yang tidak dianggarkan seperti dana darurat, dan belanja subsidi. Selain itu ada juga dana yang sudah dianggarkan namun belum terealisasi seperti belanja bunga dan belanja tak terduga yang menimbulkan timbulnya selisih dana yang belum direalisasikan sekitar 32.517.214.326.

Tabel 7. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019.

AKUN	ANGGARAN	REALISASI
Pendapatan	1.332.541.938.509	1.300.024.724.183
PAD	104.409.734.062	99.406.903.272
Pajak daerah	38.029.000.000	40.130.327.750
Daper	934.207.375.000	906.083.472.525
Hibah	31.324.800.000	40.021.468.152
Dana darurat	-	-
Belanja	1.386.102.279.726	1.290.203.142.720
Belanja bunga	1.025.000.000	-
Belanja hibah	24.518.800.000	24.766.600.000
Belanja bantuan sosial	12.200.000.000	13.280.090.000
Belanja tidak terduga	3.000.000.000	-
Belanja pegawai	5.436.317.000	316.045.000

Rangkuman hasil analisis rasio efektivitas antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan daerah kabupaten minahasa pada tahun 2016-2019 ditunjukkan dalam Tabel 8. Tingkat efektivitas belanja aparatur berfluktuasi dari tahun ke tahun, kadang mengalami peningkatan, kadang mengalami penurunan. Tahun 2016 tingkat efektivitas 100,53% dengan kriteria sangat efektif dan mengalami peningkatan di tahun 2017 menjadi 106,75% dengan kriteria sangat efektif. Tingkat efektivitas pada tahun 2017 meningkat karena realisasi pendapatan daerah melambung melebihi anggaran pendapatan. Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 106,75% menjadi 102,24% dengan kriteria sangat efektif dan terus menurun di tahun 2019 hingga 97,56% dengan kriteria cukup efektif. Tingkat efektivitas tahun 2019 menurun karena ada sebagian anggaran atau masih adanya program/kegiatan yang belum terealisasi dengan baik serta realisasi anggaran masih jauh dari target yang diharapkan. Sehingga ada dana anggaran pendapatan yang tidak terpakai sekitar 32.517.214.326.

Tabel 8. Efektivitas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa

Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Efektivitas	Kesimpulan
-------	---------------------	----------------------	-------------	------------

2016	1.307.154.121.966	1.314.065.101.716	100,53%	Sangat Efektif
2017	1.195.337.150.000	1.276.079.815.204	106,75%	Sangat Efektif
2018	1.240.173.197.898	1.267.974.996.960	102,24%	Sangat Efektif
2019	1.332.541.938.509	1.300.024.724.183	97,56%	Cukup Efektif

Tingkat efisiensi anggaran belanja aparatur Kabupaten Minahasa juga menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Tahun 2016 tingkat efisiensi sebesar 100,68% dan berada dalam kategori tidak efisien dan di Tahun 2018 juga berada dalam kategori tidak efisien dengan tingkat efisien sebesar 100,41%. Hal ini disebabkan karena realisasi belanja aparatur melebihi realisasi pendapatan. Pada Tahun 2017 tingkat efisiensi menurun menjadi 99,71% dengan kriteria kurang efisien dan mengalami penurunan juga di Tahun 2019 menjadi 99,24%. Ini disebabkan karena realisasi belanja aparatur tidak melebihi realisasi pendapatan. Secara keseluruhan tingkat efisiensi belanja aparatur pada Pemerintah Kabupaten Minahasa dikatakan kurang efisien karena masih berada dalam kriteria diatas 90%. Tingkat efisiensi berpatokan dalam hal biaya, dimana efisiensi hanya akan ditentukan input yang seminimal mungkin untuk menghaiklan outpun yang maksimal.

Tabel 9. Rasio Efisiensi Kinerja Keuangan Kabupaten Minahasa

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Efisiensi	Kesimpulan
2016	1.322.939.724.000	1.314.065.101.716	100,68%	Tidak Efisien
2017	1.272.422.425.685	1.276.079.815.204	99,71%	Kurang Efisien
2018	1.273.130.917.962	1.267.974.996.960	100,41%	Tidak Efisien
2019	1.290.203.142.720	1.300.024.724.183	99,24%	Kurang Efisien

Pembahasan

Tingkat realisasi pemerintah daerah terhadap target yang seharusnya dicapai dapat dianalisis menggunakan analisis efektivitas. Pemerintah daerah menetapkan adanya anggaran pendapatan dimaksudkan untuk mendorong kinerja pemerintah daerah dalam mencapai pendapatan yang tinggi. Berdasarkan hasil penelitian, rasio efektivitas pendapatan daerah Kabupaten Minahasa pada tahun 2016 – 2019 menunjukkan nilai > 100%.

Tahun 2016 pemerintah daerah kabupaten Minahasa menetapkan anggaran pendapatan sebesar Rp1.307.154.121.966 dari anggaran pendapatan tersebut telah direalisasikan pendapatan sebesar Rp1.314.065.101.716 sehingga rasio efektivitas ditemukan sebesar 100,53% yang menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pendapatan pemerintah daerah kabupaten Minahasa berada dalam kategori sangat efektif. Tahun 2017 terjadi penurunan anggaran pendapatan dari tahun sebelumnya menjadi Rp1.195.337.150.000 dari total anggaran pendapatan tersebut. Realisasi anggaran pendapatan yang diperoleh adalah sebesar Rp1.276.079.815.204, sehingga rasio efektivitas pada tahun 2017 adalah 106,75% atau berada pada kategori sangat efektif dimana terjadi peningkatan nilai rasio jika dibandingkan dengan tahun 2016. Pada tahun 2018 anggaran pendapatan adalah sebesar Rp1.240.173.197.898 anggaran mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian realisasi pendapatan pada tahun 2018 diperoleh sebesar Rp1.267.974.996.960 dan diperoleh tingkat efektivitas pendapatan sebesar 102,24%. Nilai tersebut berada pada kategori sangat efektif, akan tetapi jika dibandingkan dengan tingkat efektivitas pendapatan tahun sebelumnya nilai rasio tersebut mengalami penurunan. Pada tahun 2019 anggaran pendapatan ditetapkan sebesar

Rp1.332.541.938.509 nilai anggaran tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Kemudian realisasi pendapatan diperoleh sebesar Rp1.300.024.724.183 sehingga tingkat efektivitas pendapatan pada tahun 2019 menunjukkan nilai 97,56% atau berada pada kategori cukup efektif. Hal tersebut dikarenakan realisasi pendapatan yang dicapai oleh pemerintah daerah lebih rendah dari anggaran pendapatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan diatas, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Minahasa pada tahun 2016 – 2018 lebih tinggi dibandingkan anggaran pendapatan yang telah ditetapkan. Akan tetapi pada tahun 2019 realisasi pendapatan daerah Kabupaten Minahasa lebih rendah dari standar yang telah ditetapkan. Sedangkan berdasarkan rasio efektivitas, terjadi penurunan kinerja dari pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa dimana nilai rasio efektivitas yang ditunjukkan semakin kecil sejak tahun 2018. Kinerja dari pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa mengalami penurunan yang dapat dilihat dari penurunan rasio efektivitas. Meskipun rasio efektivitas pendapatan cenderung berada pada kategori sangat efisien, namun kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa kurang baik dalam upaya meningkatkan pendapatan karena rasio efektivitas pendapatan yang semakin menurun.

Sementara, untuk mengetahui peningkatan realisasi pendapatan melalui jumlah pengeluaran realisasi belanja Pemerintah daerah Kabupaten Minahasa dapat diketahui melalui analisis efisiensi. Berdasarkan hasil analisis, rasio efisiensi pendapatan daerah Kabupaten Minahasa pada tahun 2016 dan 2018 menunjukkan nilai >100%, hal ini dapat didefinisikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa pada periode tersebut melakukan kinerja keuangan secara tidak efisien. Kemudian rasio efisiensi pendapatan daerah Kabupaten Minahasa pada tahun 2017 dan 2019 menunjukkan nilai <100%, sehingga hal ini dapat diartikan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa pada periode tersebut sudah efisien.

Realisasi belanja pemerintah daerah Kabupaten Minahasa tahun 2016 adalah Rp1.322.939.724.000 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp1.314.065.101.716 sehingga rasio efisiensi ditemukan sebesar 100,68%. Berdasarkan nilai rasio tingkat keefektifan pendapatan pemerintah daerah kabupaten Minahasa tahun 2016 berada pada kategori tidak efektif. Pada tahun 2017 realisasi belanja daerah menjadi Rp1.272.422.425.685 sehingga terjadi penurunan dari tahun sebelumnya kemudian realisasi anggaran pendapatan yang diperoleh adalah sebesar Rp1.276.079.815.204 sehingga rasio efisiensi pada tahun 2017 adalah 99,71%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2016, terjadi peningkatan nilai rasio tersebut. Meskipun rasio menunjukkan nilai <100% atau dapat dikatakan sudah efisien, akan tetapi nilai tersebut termasuk dalam kategori kurang efisien karena jumlah realisasi belanja hanya memiliki selisih yang kecil dengan realisasi pendapatan.

Pada tahun 2018 terjadi kenaikan realisasi belanja dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana pada tahun tersebut sebesar Rp1.273.130.917.962. Kemudian realisasi pendapatan pada tahun 2018 diperoleh sebesar Rp1.267.974.996.960 dan diperoleh tingkat efisiensi kinerja keuangan sebesar 100,41%. Nilai tersebut berada pada kategori tidak efisien, jika dibandingkan dengan tingkat efisiensi kinerja keuangan tahun sebelumnya nilai rasio tersebut mengalami penurunan.

Pada tahun 2019 realisasi belanja adalah sebesar Rp1.290.203.142.720 nilai realisasi belanja tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Kemudian realisasi pendapatan diperoleh sebesar Rp1.300.024.724.183 sehingga tingkat efisiensi kinerja keuangan pada tahun 2019 menunjukkan nilai 99,24%. Meskipun rasio menunjukkan nilai <100% atau dapat dikatakan sudah efisien, akan tetapi nilai tersebut termasuk dalam kategori kurang efisien karena jumlah realisasi belanja hanya memiliki selisih yang kecil dengan realisasi pendapatan.

Berdasarkan penjelasan diatas, realisasi belanja daerah yang digunakan Kabupaten Minahasa pada tahun 2016 dan 2018 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pendapatan yang diperoleh. Akan tetapi pada tahun 2017 dan 2019 Kabupaten Minahasa merealisasikan anggaran belanja daerah lebih rendah dibandingkan realisasi pendapatan yang diperoleh. Sedangkan jika dilihat dari rasio efisiensi pada tahun 2016– 2019, pemerintah daerah Kabupaten Minahasa tidak stabil kinerja keuangannya, hal tersebut ditunjukkan dengan nilai rasio yang naik turun.

Secara keseluruhan rasio efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten

Minahasa cenderung tidak efisien. Melihat hal tersebut kinerja finansial Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa kurang baik dalam mengelola belanja daerah guna meningkatkan pendapatan daerah, hal tersebut dikarenakan rasio efisiensi yang berada pada nilai $>100\%$ – 100% .

Simpulan dan Saran

Dari hasil riset analisis laporan realisasi anggaran badan pengelola keuangan Kabupaten Minahasa, maka dapat diambil kesimpulan bahwa; Realisasi rasio efektivitas dan rasio efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa kurang berjalan dengan baik karena rasio efektivitas pendapatan daerah mengalami penurunan dan rasio efisiensi kinerja keuangan cenderung menunjukkan kategori tidak efisien. Setiap tahun terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa. Akan tetapi aparaturnya kurang mampu menata hasil pendapatan asli daerah sehingga masih harus bergantung dengan Dana Perintah (DaPer). Serta, Performa Finansial Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa dalam Laporan Realisasi Anggaran pada periode 2016–2019 telah berjalan efektif akan tetapi tidak efisien.

Setelah dilakukan pengkajian dan penelitian hingga menarik kesimpulan dalam riset ini, penulis memberikan beberapa saran antara lain: Pemerintah daerah Kabupaten Minahasa diharapkan dapat mengembangkan kinerja semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah. Sehingga pemerintah dapat memaksimalkan realisasi pendapatan daerah dan meminimalisir kebutuhan belanja daerah. Dengan begitu diharapkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa dapat meningkat. Gambaran untuk penelitian selanjutnya dalam pengukuran performa keuangan pemerintah daerah dapat dikembangkan dengan variabel lain seperti perbandingan keserasian, pertumbuhan dan kemandirian. Kemudian untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperpanjang periode pelaporan realisasi anggaran untuk dilakukan analisis, agar tingkat relevansi penelitian yang dicapai lebih tinggi.

Daftar Pustaka

- Badrudin, R., & Siregar, B. (2015). The evaluation of the implementation of regional autonomy in Indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets*, 7(1), 1–11. <https://doi.org/10.20885/ejem.vol7.iss1.art1>
- Daling, M. (2013). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 82–89. <https://doi.org/10.35794/emba.v1i3.1942>
- Hasanah, N., & Vidiyastutik, E. D. (2018). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran dalam Belanja Daerah Pemerintah Probolinggo. *Jurnal Ecobuss*, 6(September), 26–35.
- Kamal, S. (2017). Analisis Sumber-Sumber Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Kemp, S. E., Hort, J., & Hollowood, T. (2018). *Descriptive Analysis in Sensory Evaluation; A series of books on selected topics in the field of Sensory Evaluation*. 726.
- Leukamang, N. S. ., Junias, D. T. ., & Nafi, S. I. (2016). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Belanja Aparatur Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang. 1–19.
- Lock, I., & Seele, P. (2015). Quantitative content analysis as a method for business ethics research. *Business Ethics*, 24(S1), S24–S40. <https://doi.org/10.1111/beer.12095>
- Nisa, A., & Hanifah, N. (2020). Analysis of Effectiveness and Efficiency of Padang Puskesmas Expenditure Budget Realization 2016-2019. *Assets : Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 4(2), 78–82. <https://doi.org/10.30741/assets.v4i2.570>
- Nurfadillah, A. I. (2018). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone. In *Universitas Muhammadiyah Makassar*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Osadchy, E. A., Akhmetshin, E. M., Amirova, E. F., Bochkareva, T. N., Gazizyanova, Y. Y., & Yumashev, A. V. (2018). Financial statements of a company as an information base for decision-making in a transforming economy. *European Research Studies Journal*, 21(2), 339–350. <https://doi.org/10.35808/ersj/1006>
- Rampengan, A., Morasa, J., Pusung, R., Laporan, A., Pendapatan, R., Daerah, P., Badan, P., & Morasa, J. (2021). Analisis Laporan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(2), 326–335. <https://doi.org/10.35794/emba.v9i2.33447>
- Sajow, C., Morasa, J., & Wokas, H. R. N. (2017). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Tomohon Dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 1214–1224. <https://doi.org/10.36448/jak.v8i2.944>
- Silvia, M. A. D. C. S. E., Barbosa, F. N., & Efi, S. X. S. (2013). Analysis Of Budget Planning And Budget Realization For Assessing The Financial Performance In Program Sisca (Case Study On The National Healthy Sector Strategic Plan Support Project). 202–209.
- Suryanto, & Thalassinós. (2017). Cultural Ethics and Consequences in Whistle-Blowing Among Professional Accountants: An Empirical Analysis. *Journal of Applied Economic Sciences*, XII(52), 1725–1731.
- Wongkar, D. L., Senduk, V. A., & Tanor, L. A. O. (2021). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Di Kabupaten Minahasa. 2(1), 1–7.
- Wulandari, D. I., Menne, F., & Fajarina, R. (2020). Analisis Penyusunan Dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. 6(16), 20–30.
- Yandra, A., Nasution, S. R., Harsini, H., & Wekke, I. S. (2018). Mainstreaming Regional Budget (APBD): Issues and Challenges in Riau Province in 2015. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.15294/jpi.v3i1.11510>